
PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT MELALUI KOPERASI UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KONTRIBUSINYA DALAM PDRB PROVINSI MALUKU

**Muspida
Maryam Sangadji**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the development of cooperatives in reducing poverty and the impact on the regional economy over the past 10 years. The results obtained that the development of cooperative business volumes show a significant decrease in poverty rate and contribute to the increasing GDP.

Keywords : Cooperative, Poverty, GRDP

JEL Classification : C71, I32, R11

Pendahuluan

Landasan hukum Sistem Ekonomi Indonesia yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perekonomian disusun secara usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, perekonomian Indonesia harus disusun dari Rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maknanya dari demokrasi ekonomi.

Dalam proses pembangunan ekonomi nasional sampai saat iniditopang oleh kelompok usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Baik ditetapkan dari undang-undang koperasi nomor 14 tahun 1965, Nomor 12 tahun 1967, Nomor 12 tahun 1976 dan Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan dihubungkan dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 diatas maka bagun usaha yang sesuai adalah koperasi, karena koperasi mempunyai asas usaha kerjasama dan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan pilar utama perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengatasi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Data resmi yang bersumber dari survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa provinsi Maluku, Papua dan Papua Barat menduduki peringkat tertinggi kategori provinsi yang memiliki presentasi jumlah penduduk miskin terbesar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui koperasi terus meningkat selama 10 tahun terakhir tercatat pada tahun 2006 ada 1796 buah koperasi naik menjadi 3252 buah pada tahun 2015. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2006 sebanyak 160.446 orang naik menjadi 178.008

orang pada tahun 2015 dengan jumlah volume usaha pada tahun 2006 sebesar 105226 juta rupiah naik menjadi 332.878,07 juta rupiah pada tahun 2015.

Dalam penelitian ini, hasil-hasil perkembangan perkoperasian di Provinsi Maluku berkembang rata-rata 9% setiap tahun dalam 10 tahun terakhir perkembangan koperasi, jumlah anggota koperasi dan jumlah volume usaha dapat menjadi stimulasi bagi penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku.

Pertanyaan penelitian yang menjadi fokus bagi peneliti adalah seberapa besar peranan koperasi dalam menurunkan keluarga miskin dan seberapa besar kontribusi volume usaha koperasi pada PDRB Provinsi Maluku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar perkembangan usaha koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan kontribusinya dalam PDRB di Provinsi Maluku.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan ekonomi di Indonesia sejak pemerintahan orde baru dilaksanakan berdasarkan 3 model yaitu model agregat, model hubungan efek kelipatan (multiplier effect and rcor) dan model perencanaan sektoral (Kunarjo Dahlan Rian Nugna, 2003:70).

Model agregat bertumpu pada teori ekonomi makro dimana konsep intinya adalah pendapatan domestik bruto (PDRB) dan kosep-kosep yang melengkapinya. Konsep ini merupakan satu rumusan yang mengatakan bahwa produk domestik buto (PDB)

adalah penjumlahan dari konsumsi (C), Investasi (I), Pengeluaran Pemerintah (G), Ekspor (X), dikurangi Import (M). Jadi $Y(=PDB) = C+I+G+X-M$. Dengan model ini berarti koperasi adalah bentuk Investasi Swasta (I).

Model ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena dari segi kuantitatif mudah dipahami dan mudah diukur sehingga menarik untuk dijadikan model. Aturan model ini tidaklah otomatis mencerminkan tentang tanggungjawabnya kemiskinan yang ada. Pada banyak negara berkembang justru besarnya PDB dan pendapatan perkapita menyembunyikan fakta bahwa pembangunan lebih banyak menghasilkan ketimpangan antara sebagian kecil kelompok masyarakat yang sejahtera karena memperoleh prioritas untuk mengejar angka PDB dan pendapatan perkapita, dan disisi lainnya ada sebagian besar masyarakat hidup dengan standar kualitas yang sangat jauh dibandingkan kelompok pertama.

Model kedua adalah model hubungan efek kelipatan dan icor. Teori pertama kali diperkenalkan oleh John Maynard Keynes dalam *The General Theory Of Employment, Interest and Money* (Riant, 2003;71). Konsep ini pada prinsipnya menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat Investasi (I) dengan pendapatan (Y) atau dengan kata lain bahwa apabila ada tambahan investasi maka akan bertambah pada tingkat pendapatan dengan kelipatan sebesar kebalikan dari Marginal Propensity to Save (MPs) atau angka koefisien yang menunjukkan berapa kenaikan tingkat tabungan jika pendapatan meningkat dengan jumlah tertentu dengan nilai angka pecahan kurang dari satu.

Model ini diperkaya dengan model Imeremental Capital Output Ratio (ICOR). Sri Hanna yang menyebutkan bahwa investasi harus diartikan sebagai pertambahan kapasitas produksi ICOR sendiri diidentifikasi sebagai rasio investasi yang diperlukan untuk memperoleh pertambahan pendapatan pada periode tertentu.

Prinsip pokok pembangunan mengkaji kepada kondisi dan rakyat yang hendak dibangun. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah orde baru menyisahkan kesenjangan yang lebar dari dalam antara mereka yang berhasil dan mereka yang gagal dalam

pembangunan. Didalam kelompok istilah teknis biasa disebut kelompok yang "kaya" dan kelompok "miskin" atau kelompok "kuat" dan kelompok "lemah". Karena itu yang menjadi tugas pembangunan di era reformasi ada dua yaitu; (1) memihak yang lemah agar menjadi kuat dan mandiri, (2) menjaga yang kuat agar tidak jatuh menjadi lemah, bahwa harus menjadi mitra pemerintah untuk mengangkat yang lemah.

Pendekatan ekonomi kerakyatan untuk membangun seluruh pelaku ekonomi menjadi pelaku-pelaku yang kuat dan mandiri menjadi tantangan pembangunan sekarang dan menjadi inti dari pembangunan. Dikatakan bahwa negara dalam kondisi berbahaya jika masyarakatnya miskin. Kemiskinan memiliki pengaruh yang sangat buruk pada setiap sisi kehidupan manusia oleh karena itu tugas pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan. Pembangunan harus menggunakan ekonomi rakyat agar tidak berada dalam kemiskinan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, untuk memberikan gambaran tentang perkembangan koperasi di Maluku dan dampaknya terhadap penanggulangan kemiskinan dan perkembangan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder didalam bentuk laporan yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan laporan lainnya yang mendukung. Alat analisis yang digunakan adalah analisis tabulasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Koperasi

Selama 10 tahun terakhir koperasi berkembang cukup signifikan. Pada tahun 2006 ada 1796 buah koperasi naik menjadi 3252 buah pada tahun 2015, atau naiknya rata-rata 9% setiap tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel (1)
Perkembangan Jumlah Koperasi, Jumlah Anggota Koperasi dan Jumlah Volume Usaha
Di Provinsi Maluku Tahun 2006-2013

No.	Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi (orang)	Jumlah Volume Usaha (Rp Juta)
1.	2006	1.796	160.446	105.226,00
2.	2007	2.028	160.987	170.656,40
3.	2008	2.220	115.235	160.949,45
4.	2009	2.517	142.477	195.852,15
5.	2010	2.665	151.517	176.069,45
6.	2011	2.800	164.151	155.961,74
7.	2012	2.965	470.519	207.569,73
8.	2013	3.095	175.887	284.058,23
9.	2014	3.158	175.887	291.051,27
10.	2015	3.252	178.008	332.878,08

Sumber: Maluku Dalam Angka Tahun 2008, 2011, 2013 dan 2016

Pada tahun 2006-2015 pertumbuhan koperasi 9% rata-rata setiap tahun, namun pertumbuhan jumlah anggota koperasi hanya 1,22% setiap tahun. Sedangkan jumlah volume usaha tumbuh rata-rata 18% setiap tahun. Pada tahun 2006 jumlah anggota koperasi 160.466 orang naik menjadi 17.008 orang pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 koperasi aktif berjumlah 2481 buah atau 74,35%, dari jumlah tersebut di Kota Ambon terdapat 26%, di Maluku Tengah 14,4%, di Maluku Tenggara 12,24%, di Kota Tual 11,86% dan sisanya 24% tersebar di 7 Kabupaten lainnya (Dinas koperasi tahun 2016).

Jumlah Volume usaha koperasi pada tahun 2006 berjumlah Rp.105.226,00 juta, dan meningkat menjadi Rp.332.887,07 juta pada tahun 2015, atau terjadi peningkatan sebesar 18% rata-rata setiap tahun.

Dari jumlah volume usaha tersebut, jumlah modal sendiri 40,50%, modal luar 26% dan 33,42% adalah dana subsidi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena koperasi adalah cabang usaha yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (UUD 1945 pasal 33 ayat 2).

Dampak Perkembangan Koperasi Terhadap Penanggulangan Kemiskinan.

Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku sebanyak 418,6 ribu orang, dan menurun menjadi 327,77 ribu orang pada tahun 2015, berarti terjadi penurunan sebesar 24%, rata-rata setiap tahun dari 2006-2015, atau selama 10 tahun terakhir. Berarti dapat dijelaskan bahwa pada saat jumlah koperasi tumbuh sebesar 9% menyebabkan jumlah volume usaha tumbuh sebesar 18%, dengan sumber modal seperti yang dijelaskan diatas.

Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin sebanyak 418,6 ribu orang dan menurun menjadi 327,77 ribu orang pada tahun 2015. Berarti dapat dijelaskan koperasi tumbuh 9% menyebabkan jumlah volume usaha tumbuh 18% berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin 24% rata-rata setiap tahun, dan penurunan presentasi penduduk miskin sebesar 4,2% rata-rata setiap tahun (periksa Tabel.2 berikut)

Tabel (2)
Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2006-2015 di Provinsi Maluku

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (000 orang)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk (%)
1.	2006	1.364.585	418.6	30.7
2.	2007	1.450.435	404.7	28.0
3.	2008	1.460.486	388.8	26.6
4.	2009	1.501.229	369.1	24.6
5.	2010	1.541.903	389.5	25.3
6.	2011	1.570.657	358.4	22.3
7.	2012	1.599.505	328.9	21.2
8.	2013	1.628.413	327.51	19.8
9.	2014	1.686.469	307.02	18.2
10.	2015	4.715.548	327.77	19.1

Sumber: BPS Provinsi Maluku 2016

Pada tabel. diatas nampak bahwa jumlah penduduk Maluku pada tahun 2006 berjumlah 10364.585 ribu orang dan meningkat menjadi 1.775.548 ribu orang pada tahun 2015. Dari jumlah penduduk tersebut pada tahun 2006, 418.6 ribu orang adalah penduduk miskin atau 30.7%. Pada tahun 2015 penduduk miskin menurun menjadi 327.77 ribu orang atau 19.1% dari jumlah penduduk,

Kontribusi Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Pada tahun 2006 PDRB Provinsi Maluku atas harga constant tanpa migasi berjumlah 3.424.966,11 juta rupiah dan naik menjadi 5.857.405,41 juta rupiah pada tahun 2015 atau terjadi peningkatan sebesar 8% rata-rata tiap tahun.

Pada tahun 2006 kontribusi volume usaha koperasi sebesar 3.36% naik menjadi 5.68% pada tahun 2015. Berarti laju pertumbuhan kontribusi volume usaha koperasi dalam PDRB sebesar 7.62% rata-rata setiap tahun, selama kurung waktu pengamatan.

Berarti elastisitas pertumbuhan volume usaha koperasi terhadap PDRB 2,25. Hal ini menjelaskan peranan perkembangan ekonomi rakyat dalam PDRB Provinsi Maluku, sub sector tanaman pangan, sub sector perternakan dan sub sector perikanan.

Table (3)
PDRB Tahun 2000 Tanpa Migas Jumlah Volume Usaha Koperasi dan Kontribusi Dalam PDRB
Tahun 2006-2015 di Provinsi Maluku

No.	Tahun	PDRB ADHK Tahun 2000 Tanpa Migas (Rp Juta)	Volume Usaha Koperasi (Rp Juta)	Kon tribusi (%)
1.	2006	3.424.966,11	105.226,00	3.36
2.	2007	3.621.628,21	170.656,40	4.71
3.	2008	3.774.777,99	160.949,45	4.77
4.	2009	3.980.147,35	195.852,15	4.92
5.	2010	4.237.757,95	176.069,45	4.63
6.	2011	4.494.778,21	155.961,74	4.45
7.	2012	4.846.051,39	207.569,73	5.52
8.	2013	5.095.294,30	284.058,23	5.20
9.	2014	5.463.997,42	291.051,37	5.38
10.	2015	5.857.405,41	332.878,07	5.68

Sumber: BPS Provinsi Maluku Dalam Angka 2008, 2011, 2016 (Data diolah)

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi selama 10 tahun terakhir cukup signifikan karena koperasi tumbuh rata-rata 9% setiap tahun, menyebabkan jumlah volume usaha koperasi tumbuh 18% rata-rata tiap tahun.

Kemandirian usaha koperasi Nampak dalam komposisi modal sendiri sebesar 40.50%, modal luar 26% dan pemerintah 33.42%.

Peningkatan volume usaha sebesar 18% berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 2.4% rata-rata setiap tahun dan penurunan presentasi penduduk miskin sebesar 4.2% rata-rata setiap tahun.

Kontribusi volume usaha koperasi terhadap PDRB meningkat dari 3.36% persen pada tahun 2006 menjadi 5.68% pada tahun 2015. Dengan elastisitas pertumbuhan sebesar 2.25 yang mengidentifikasi

kemampuan ekonomi rakyat dalam perekonomian Provinsi Maluku.

Implikasi

Perkembangan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat telah berhasil menanggulangi kemiskinan di Provinsi Maluku dan memberikan kontribusi yang cukup dalam tumbuh kembang perekonomian daerah ini.

DAFTAR REFERENSI

- Angita Abimanyun, 2000 “Ekonomi Indonesia Baru”. Kajian dan Alternatif solusi menuju pemilihan, Penerbit, *PT. Elex-Media Komputinda*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku “Maluku dalam Angka 2008”
- _____, Maluku dalam Angka 2011”
- _____, Maluku dalam Angka 2013”
- _____, Maluku dalam Angka 2016”
- Riant, Nugraha, 2003, “Reiventing Pembangunan” menata ulang paradigm pembangunan untuk membangun Indonesia Baru, Penerbit *PT. Elex-Media Komputinda*, Jakarta.